

BAB V

KESIMPULAN

Isu gender menjadi isu global sejak PBB mengadakan *World Conference on Women* di Meksiko pada tahun 1975. Perjuangan dan perkembangan kesetaraan gender mulai terjadi dimana-mana sejak saat itu. Namun berbeda dengan daerah lain, kawasan Eropa telah lebih dahulu berkecimpung dalam perjuangan kesetaraan gender ini. Setelah abad 21, Eropa—yang telah membentuk organisasi Uni Eropa—berhasil mengalami perkembangan kesetaraan gender yang pesat dibandingkan daerah lain secara keseluruhan. Uni Eropa dapat dikatakan mempunyai tingkat kesetaraan gender yang tinggi pada saat ini bahkan menjadi contoh bagi negara lain di dunia. Pada tahun 2015, Eropa mampu berada diatas rata-rata indeks ketidakesetaraan gender dunia dan menjadi peringkat pertama dengan indeks hanya 0,279. Tingkat kesetaraan gender sendiri dapat dikatakan tinggi bila berada diatas rata-rata indeks kesenjangan dunia dengan *gap* yang lebih sedikit. Hal ini berdasar pada standarisasi yang digunakan PBB, yaitu dengan *Gender Development Index* (pendidikan dan kesehatan) dan *Gender Empowerment Measure* (politik dan ekonomi).

Perkembangan kesetaraan gender di Eropa semakin dipermudah dengan adanya Uni Eropa yang institusi nya sangat mendukung integrasi dan kebijakan bersama. Peningkatan demi peningkatan terlihat setiap tahunnya. Peningkatan ini dapat dilihat dengan adanya indeks kesetaraan gender Uni Eropa. Secara keseluruhan, indeks kesetaraan gender Uni Eropa mengalami peningkatan yang dimulai dari 62% pada tahun 2005, 63,8% tahun 2010, kemudian menjadi 66,2% pada tahun 2015. Di masing-masing sektor yang menjadi determinan tingkat kesetaraan gender (pendidikan, kesehatan, politik, dan ekonomi) juga terus mengalami peningkatan. Di sektor pendidikan, partisipasi & pencapain terus mengalami peningkatan kesetaraan sedangkan segregasi sedikit naik turun. Di sektor kesehatan, status & akses terus mengalami peningkatan dengan angka yang hampir sempurna. Kemudian,

pada sektor politik juga terus mengalami peningkatan yang stabil dalam partisipasi legislatif dan jabatan ketua/menteri oleh perempuan. Terakhir, di sektor ekonomi baik dari rekonsiliasi waktu rumah tangga-pekerjaan, partisipasi dan kondisi kerja, posisi pembuat keputusan ekonomi, hingga keuangan/pendapatan mandiri walaupun sedikit demi sedikit tetapi tetap mengalami peningkatan kesetaraan.

Tingkat kesetaraan gender tinggi yang diperoleh Uni Eropa dan perkembangannya yang masih terus meningkat dipengaruhi oleh 2 penyebab utama. Pertama, karena adanya advokasi yang dilakukan oleh gerakan-gerakan perempuan (*feminist*) sehingga pengarusutamaan gender di Uni Eropa dapat meningkat dan pada akhirnya meningkatkan indeks angka kesetaraan gender. Hingga saat ini, banyak gerakan perempuan Uni Eropa yang aktif melakukan advokasinya—baik gerakan berskala nasional maupun gerakan perempuan yang mempunyai skala Uni Eropa—untuk meningkatkan pengarusutamaan gender. Bahkan organisasi sosial yang berbasis non-gender pun juga ada yang turut serta. Adapun contoh-contoh gerakan feminist dengan skala Uni Eropa, diantaranya: *European Women's Lobby* (EWL), *Women In Development Europe+* (WIDE+), *European Institute of Women's Health* (EIWH), dan *European Student's Union* (ESU). Keempat organisasi tersebut aktif melakukan advokasi di 4 sektor (pendidikan, kesehatan, politik, dan ekonomi) yang menjadi isu gender.

Dari tahun 2008 hingga tahun 2018, berbagai macam topik advokasi telah diupayakan oleh keempat gerakan tersebut. Tuntutan yang diupayakan mulai dari sektor ekonomi (*gender pay gap*, kesetaraan kesempatan dan perlakuan, gender dalam perdagangan, *work-life balance*, dll), pendidikan (partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi & vokasi, pelatihan *skill* untuk perempuan, beasiswa & bantuan finansial, keseimbangan tim-tim ahli/ilmuwan, pencegahan putus sekolah terutama perempuan, dll), kesehatan (perlindungan uji klinis pada perempuan, kesetaraan status & fasilitas untuk gender, penghilangan kekerasan yang berbasis gender, dll), dan politik

(peningkatan partisipasi perempuan sebagai pembuat keputusan politik dan diberlakukannya kuota gender atau *positive actions*).

Berbagai kesuksesan berupa perubahan kebijakan juga telah nampak di segala sektor kebijakan Uni Eropa, diantaranya: *Council Decision* (EU) 2015/1848, *European Parliament Resolution on Gender in EU Trade Agreements 2018*, *Charter Of Fundamental Rights Of The European Union 2012*, *Council Directive 2010/18/EU (parental leave)*, dll sebagai hasil advokasi WIDE+ dan EWL dalam sektor ekonomi ; *Council Recommendation 2011/C 191/01, Regulation (EU) No 1290/2013, Regulation (EU) No 1292/2013, Regulation (EU) No 1288/2013*, dll sebagai hasil advokasi oleh EWL & ESU dalam sektor pendidikan ; *Directive 2011/36/EU & Directive 2012/29/EU, Regulation (EU) No 282/2014, European Parliament Resolution 2012, Regulation (EU) No 536/2014 of The European Parliament and of The Council*, dll sebagai hasil advokasi oleh EIWH dalam sektor kesehatan ; dan terakhir *Regulation (EU) No 235/2014 & European Parliament Resolution of 13 March 2012* sebagai hasil advokasi oleh EWL dalam sektor politik.

Penyebab tingkat kesetaraan gender Uni Eropa tinggi yang kedua adalah adanya *regime* gender yang mampu meningkatkan kesetaraan gender. *Regime* gender dapat dilihat melalui adanya 4 faktor (prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan) yang menandakan suatu *regime* dapat disebut *regime*. Semakin banyak, konkrit, dan komprehensif keempat faktor tersebut menandakan bahwa negara-negara juga semakin berkomitmen yang berujung kepada semakin kuatnya *regime* gender yang ada. *Regime* gender di Uni Eropa pun dapat dikatakan demikian. Dibuktikan mulai dari bagian implisit dari *regime*, yaitu prinsip dan norma. Uni Eropa mempunyai 2 prinsip utama, yaitu prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Prinsip yang abstrak ini kemudian dapat lebih dioperasionalkan melalui pernyataan atau piagam/pakta yang mengandung prinsip didalamnya. Contoh-contohnya: adanya pernyataan presiden Komisi Eropa dan presiden Parlemen Eropa serta adanya prinsip dalam klausa-klausa *Women's*

Charter 2010, Charter Of Fundamental Rights Of The European Union tahun 2012, dan dalam kebijakan pembangunan Uni Eropa yang satu dari 5 prinsip nya merupakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Uni Eropa juga mempunyai banyak norma gender yang dapat terlihat atau diukur dari perilaku negara-negara maupun masyarakat Uni Eropa untuk melakukan pengarusutamaan gender, membuat berbagai macam gerakan perempuan, *positive actions*, hingga pemberdayaan perempuan.

Eksistensi *regime* gender juga dibuktikan dengan bagian eksplisit (aturan dan prosedur pembuatan kebijakan). Aturan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat, khususnya di Uni Eropa yang mempunyai bermacam-macam aturan (*regulations, directives, decision, recommendation, opinion, dan resolution*) yang diiringi dengan aturan nasional masing-masing negara. Uni Eropa berhasil menghasilkan berbagai macam aturan dengan skala dan area yang semakin luas, diantaranya: *Council Directive 2010/18/EU, Commission Decision 2008/590/EC, European Parliament Resolution 2013/C 251 E/02, Hungary Government Resolution No. 1004/2010 (I. 21.), Sweden amendment on Parental Leave 2016*, dan lain sebagainya. Kemudian, Uni Eropa juga berhasil membuat berbagai macam prosedur pembuatan kebijakan di beberapa area dengan fokus dan sistem yang berbeda-beda, diantaranya: *The Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015 dan Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019, European Institute for Gender Equality (EIGE) dan European Gender Equality Index (EGEI), Gender Action Plan 2010-2015 & Gender Action Plan 2016-2019, Gender Equality in Horizon 2020, serta Workshop dan public hearing* oleh FEMM.

Uni Eropa dapat dikatakan mampu memenuhi 4 faktor yang mendefinisikan eksistensi sebuah *regime*. Tidak hanya mampu membuat *regime* gender ada tetapi juga mampu meningkatkan kesetaraan gender di Uni Eropa sehingga tinggi.